



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	885.633.965.767,00	870.256.487.463,00	98,26	844.790.713.397,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.673.955.288,00	70.985.312.496,00	113,26	55.206.420.973,00
11	Jumlah Pendapatan Transfe (9 s.d. 10)	948.307.921.055,00	941.241.799.959,00	99,25	899.997.134.370,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
13	Pendapatan Hibah	12.722.026.000,00	12.722.026.000,00	100,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	35.647.592.000,00
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (13 s.d. 14)	12.722.026.000,00	12.722.026.000,00	100,00	35.647.592.000,00
16	JUMLAH PENDAPATAN (7+11+15)	961.029.947.055,00	953.963.825.959,00	99,26	935.644.726.370,00
17	BELANJA				
18	BELANJA OPERASI				
19	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Bunga	4.900.000.000,00	4.469.946.021,00	91,22	0,00
22	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Belanja Operasi (19 s.d. 24)	4.900.000.000,00	4.469.946.021,00	91,22	0,00
26	BELANJA MODAL				
27	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Belanja Modal (27 s.d. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA				
35	Belanja Tidak Terduga	3.545.261.315,00	2.417.830.965,00	68,20	2.220.535.100,00
36	Jumlah Belanja Tidak Terduga (35)	3.545.261.315,00	2.417.830.965,00	68,20	2.220.535.100,00
37	BELANJA TRANSFER				
38	Belanja Bagi Hasil	1.896.020.200,00	1.475.794.900,00	77,84	1.830.761.000,00
39	Bagi Hasil Pajak			0,00	
40	Bagi Hasil Retribusi			0,00	
41	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.037.000,00	170.854.037.000,00	100,00	179.898.587.000,00
42	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Transfer (38 s.d. 43)	172.750.057.200,00	172.329.831.900,00	99,76	181.729.348.000,00
45	JUMLAH BELANJA DAERAH (25+33+36+44)	181.195.318.515,00	179.217.608.886,00	98,91	183.949.883.100,00
46	SUPRLUS/ (DEFISIT) (16 - 45)	779.834.628.540,00	774.746.217.073,00	99,35	751.694.843.270,00
47	PEMBIAYAAN DAERAH				
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
49	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.959.356.109,00	56.959.356.108,81	100,00	57.625.748.528,17
50	Penerimaan Pinjaman Daerah	58.612.469.000,00	57.991.820.750,00	98,94	19.653.117.250,00
51	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (48 s.d. 50)	115.571.825.109,00	114.951.176.858,81	99,46	77.278.865.778,17
52	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
53	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
54	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.794.453.846,00	7.466.009.725,00	84,89	145.433.068,00
55	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (53 s.d. 54)	10.794.453.846,00	9.466.009.725,00	87,69	2.145.433.068,00
56	PEMBIAYAAN NETTO (51 - 55)	104.777.371.263,00	105.485.167.133,81	100,68	75.133.432.710,17
57	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (46 - 56)	884.611.999.803,00	880.231.384.206,81	99,50	826.828.275.980,17

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Barat merupakan entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual yang dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Liwa, 28 Februari 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat,



K. CK MAL, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196410051994031003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Tulip No. 9 Way Mengaku, Liwa 34811, Telp. (0728) 21106, Faks (0728) 21106

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Liwa, 28 Februari 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat,



Dr. OKMAL, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196410051994031003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Tulip No. 9 Way Mengaku, Liwa 34811, Telp. (0728) 21106, Faks (0728) 21106

Liwa, 28 Februari 2023

Nomor : 900 / 172.b / W.01 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Representasi Manajemen

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama Pemeriksaan :

1. Laporan Keuangan yang disebut diatas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan, transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku, transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang keuangan Negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 28 Februari 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat,



Dr. OKMA L. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641005 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat